The Pseudo Rivality of Political Elites in The Governor Election East Java Province in 2018

Rivalitas Semu Elite Politik pada Pemilukada Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018

Muhammad Aditya Pradana

Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Depok, Jawa Barat

Abstract

Rivalry and elite cooperation in Indonesia exist due to the existence of interests between groups of actors that intersect with each other in various aspects. That the elite always tries to create consensus through cooperation on the calculation of profits even though there is rivalry between the elites who intersect. This can be seen from the post-conflict local elections in East Java in 2008, 2013, and 2018. In the 2008 and 2013 East Java regional elections, Soekarwo became Khofifah's rival. However, in the 2018 East Java election, Soekarwo turned to support Khofifah and decided not to support his deputy for two periods, namely Saifullah Yusuf. This study wants to see the factors behind elite rivalry and cooperation, especially in the context of the 2018 East Java Regional Election. This research uses qualitative methods. In addition, this research also uses the theory of antagonistic cooperation, boundary control theory, party-led transition, and integration theory and elite circles. The results of this study show that there is a role for the national elite, in this context the DPP of the Democratic Party and the influence of President Joko Widodo in the transition of Soekarwo's support to Khofifah. In addition, this study also found that there was a relationship of interdependence between Soekarwo and Khofifah. Soekarwo hopes that what he is doing can be continued by Khofifah, while Khofifah depends on the full support of Soekarwo so that he can win in an area that he has never won before.

Keywords: elite rivalry, East Java Regional Head Election, Soekarwo, Khofifah Indar Parawansa

Abstrak

Rivalitas dan kerja sama elite di Indonesia hadir akibat adanya kepentingan antar kelompok aktor yang saling bersinggungan satu sama lain di dalam berbagai aspek. Bahwa elite selalu berusaha untuk menciptakan konsensus melalui kerja sama atas perhitungan keuntungan sekalipun terdapat rivalitas di antara elite yang bersinggungan. Hal ini dapat terlihat dari pemilukada di Jawa Timur pada 2008, 2013, dan 2018. Pada Pemilukada Jawa Timur 2008 dan 2013, Soekarwo menjadi rival dari Khofifah. Namun, pada Pemilukada Jawa Timur 2018, Soekarwo beralih mendukung Khofifah dan memutuskan tidak mendukung wakilnya selama dua periode, yaitu Saifullah Yusuf. Penelitian ini ingin melihat faktor melatarbelakangi rivalitas dan kerja sama elit, khususnya dalam konteks Pemilukada Jawa Timur 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori kerja sama Antagonistik, Teori Boundary Control, Party-led Transition, dan Teori Integrasi dan Lingkaran Elite. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat peran dari elite nasional, dalam konteks ini DPP Partai Demokrat dan adanya pengaruh presiden Joko Widodo dalam peralihan dukungan Soekarwo kepada Khofifah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat hubungan saling ketergantungan antara Soekarwo dan Khofifah. Soekarwo berharap bahwa apa yang ia lakukan dapat diteruskan oleh Khofifah, sedangkan Khofifah bergantung dengan dukungan penuh dari Soekarwo sehingga ia dapat menang di wilayah yang ia tidak pernah menangkan sebelumnya.

Kata kunci: rivalitas elite, Pemilukada Jawa Timur, Soekarwo, Khofifah Indar Parawansa

Corresponding Author: m.adityapradana11@gmail.com

PENDAHULUAN

Rivalitas dan kerja sama elite di Indonesia hadir akibat adanya kepentingan antar kelompok aktor yang saling bersinggungan satu sama lain di dalam berbagai aspek. Beberapa aspek utama yang menyebabkan adanya rivalitas sekaligus kerja sama elite di antaranya adalah pembelahan kelompok elite, perbedaan kepentingan, ikatan rezim penguasa, organisasi hingga latar belakang pendidikan (Emmerson 1972: 452; Feith 2007: 207). Apabila berkaca pada dinamika kerja sama elite di beberapa negara lain, menunjukkan bahwa elite selalu berusaha untuk menciptakan konsensus melalui kerja sama atas perhitungan keuntungan sekalipun terdapat rivalitas di antara elite yang bersinggungan (Burton & Higley 1992; Moore 1979; Baylis 2012)

Pasca kejatuhan rezim Orde Baru di Indonesia, kelompok elite dalam konsep presidensialisme mencerminkan bahwa aktor harus mampu mengatur atau menegosiasikan antara tuntutan populer dari pemilih, kepentingan aktor yang kuat dan institusi politik yang terus berkembang di Indonesia (Tomsa, 2018: 266). Perkembangan demokratisasi pasca-Orde Baru kemudian menciptakan ruang bagi kepentingan elite yang berada di luar rezim Orde Baru untuk berkontestasi untuk ikut andil di dalam persaingan memperebutkan sumber daya yang sebelumnya tidak mampu diakses (Hadiz, 2003: 591). Meskipun terdapat adanya kompetisi di antara elite, akan tetapi memunculkan kecenderungan elite untuk bekerja sama. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia pada 2014 hingga 2019, di mana rivalitas antara petahana Presiden Joko Widodo dan pesaingnya Prabowo Subianto selama dua periode Pemilu dapat berujung dengan terjadinya pembentukan koalisi yang melibatkan kelompok oposisi baik di dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini menunjukkan adanya *illiberal shift*, yang menunjukkan adanya pembentukan kerja sama di antara elite sekalipun telah melalui rivalitas berdasarkan ideologi dalam pemilihan yang kompetitif (Aspinall & Mietzner 2019: 298). Dengan kata lain, sekalipun elite telah berkompetisi dalam lembaga demokrasi akan tetapi cenderung memicu adanya kompromi di antara elite di tingkat nasional.

Di sisi yang berbeda, dengan adanya perluasan akses politik berupa demokratisasi di tingkat lokal melalui desentralisasi, menciptakan ruang negosiasi di antara elite dan aktor berkepentingan di daerah maupun pusat dalam mengatur persaingan di tingkat lokal dalam bentuk kerja sama, salah satunya yakni Pemilukada langsung. Pemilukada langsung menjadi ruang bagi elite di tingkat pusat maupun daerah untuk bersaing satu sama lain sekaligus bekerja sama menegosiasikan kepentingan dalam mencapai konsensus. Hal ini dapat terlihat dari pemilukada di Jawa Timur pada 2008, 2013, dan 2018.

Sejak 2008 persaingan dalam memperebutkan kursi Gubernur Provinsi Jawa Timur selalu melibatkan antara dua tokoh elite yang berkompetisi, yakni Soekarwo dengan Khofifah Indar Parawansa. Persaingan Pemilukada Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2008 dan tahun 2013 selalu dimenangkan oleh Soekarwo yang selama dua periode berturut-turut selalu berpasangan dengan Saifullah Yusuf.

Persoalan muncul ketika terjadi perubahan konstelasi politik di Provinsi Jawa Timur yang menyebabkan adanya persaingan di antara Khofifah dengan Saifullah yang kali ini sama-sama memperebutkan kursi Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dalam kontestasi Pemilukada Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018, Khofifah berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak (Emil Dardak). Pasangan ini diusung oleh koalisi partai politik di antaranya; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura).

Khofifah bersama Emil Dardak telah melakukan penjajakan dengan beberapa partai politik sejak akhir tahun 2017, salah satunya kepada Partai Demokrat. Penjajakan tersebut bersambut dengan penyerahan surat dukungan Partai Demokrat yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pada 7 Desember 2017. Meskipun partainya secara resmi telah mendukung pasangan Khofifah-Emil, akan tetapi di kesempatan yang lain Soekarwo justru memiliki keputusan yang berseberangan. Soekarwo mengatakan bahwa secara pribadi mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai calon gubernur, karena selama delapan tahun telah bersama-sama, hal ini disampaikan se usai menghadiri penutupan kirab Pemuda Nusantara di Pendopo Kabupaten Blitar (Inews.id, 2017). Meskipun kemudian ketika awal 2018, terdapat perubahan sikap dari Soekarwo. Padahal, jika mengacu pada dua pemilukada sebelumnya, terasa kental adanya rivalitas antara Soekarwo dan Khofifah. Pada dua pemilukada sebelumnya berujung pada penyelesaian sengketa hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut dilakukan oleh Khofifah karena terdapat kecurangan yang telah dilakukan Soekarwo-Saifullah selama dua kali keikutsertaannya di pemilukada, meskipun kemudian MK selalu memutuskan bahwa pasangan Soekarwo-Saifullah adalah pemenang dalam dua kali kontestasi pemilukada tersebut.

Perubahan sikap Soekarwo dengan mendukung Khofifah ditandai dengan adanya surat dukungan dan ajakan Soekarwo secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jawa Timur untuk memilih pasangan Khofifah-Emil (Ardlyanto, 2018). Sekretaris DPD Partai

Demokrat Provinsi Jawa Timur, Renville Antonio, menyebutkan bahwa Soekarwo telah mengungkapkan secara nonformal sudah menyerahkan tim pemenangannya selama dua periode saat mencalonkan gubernur, untuk membantu pemenangan pasangan Khofifah-Emil.

Di sisi lain, pada mulanya Saifullah Yusuf akan dipasangkan oleh Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Sunariyah, 2018). Namun, karena Bupati Banyuwangi tersebut tertimpa skandal, PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Puti Guntur Soekarno sebagai pengganti Abdullah Azwar Anas untuk mendampingi Saifullah. Saifullah dari faktor kesejarahan tercatat mempunyai kedekatan hubungan dengan PDI Perjuangan, karena Saifullah pernah menjadi kader dan terpilih menjadi anggota legislatif dari PDI Perjuangan sebelum akhirnya memutuskan keluar dan pindah ke PKB pada 2001. Saifullah saat itu dinilai sebagai lambang aliansi dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri (Mega), karena Saifullah adalah orang kepercayaan Gus Dur dan ditempatkan di PDI Perjuangan (Yulika, 2017).

Kompetisi yang sangat keras pada dua kontestasi Pemilu Gubernur Provinsi Jawa Timur 2008 dan 2013 yang mempertemukan Soekarwo dan Khofifah, hingga tercipta antagonisme yang berujung persaingan yang sangat ketat di antara Soekarwo dan Khofifah. Tiba-tiba dalam satu waktu bisa berubah dan bahkan dua kutub kekuatan yang ada di tingkat lokal Jawa Timur ini akhirnya mencair dan bekerja sama dalam kontestasi Pemilu Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Soekarwo memberikan dukungannya kepada Khofifah yang merupakan rival terkuatnya pada dua pemilu gubernur sebelumnya. Sebagai petahana Gubernur Jawa Timur selama dua periode bersama wakilnya Saifullah, sudah sepatutnya Soekarwo memberikan dukungannya kepada Saifullah dalam kontestasi Pemilu Gubernur 2018 ini untuk maju menggantikan posisinya sebagai Gubernur Jawa Timur, tetapi hal ini tidak terjadi. Saifullah yang juga merupakan bagian dari lingkaran oligarki yang ada di Jawa Timur, secara proporsi terlihat lebih ideal untuk diberikan dukungan ketimbang Khofifah, tetapi Soekarwo yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur justru mendukung pasangan Khofifah-Emil. Hal ini dipertegas pada saat Partai Demokrat melalui ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Khofifah-Emil di depan masyarakat Jawa Timur saat bersafari politik dan mendorong warga untuk mendukung pasangan Khofifah-Emil (Budianto, 2018).

Dukungan Soekarwo cukup berdampak bagi keberhasilan Khofifah di Pemilu Gubernur 2018. Hal ini terbukti dari tiga belas wilayah yang dimenangkan oleh Khofifah pada Pemilu 2018, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Sampang. Tiga belas wilayah ini merupakan wilayah yang pada dua pemilu gubernur sebelumnya selalu dimenangkan oleh Soekarwo dan tidak pernah dimenangkan oleh Khofifah. Dapat diartikan bahwa tiga belas wilayah ini merupakan basis massa dari Soekarwo yang kini telah menjadi wilayah kemenangan untuk Khofifah.

Melihat penjelasan tersebut, asumsi penulis bahwa dukungan politik Soekarwo terhadap Khofifah sangat berdampak bagi kemenangan Khofifah pada Pemilu Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018. Oleh karena itu, penulis ingin melihat lebih dalam terkait motif dan alasan Soekarwo mendukung Khofifah yang merupakan lawannya di dua pemilu gubernur sebelumnya dan bukan mendukung Saifullah yang merupakan wakilnya di dua periode berturut-turut sebelumnya. Adanya peralihan dukungan tersebut mencerminkan bahwa terdapat rivalitas sesaat yang sangat dipengaruhi oleh dinamika kontestasi politik elektoral di Provinsi Jawa Timur. Menurut penulis, peralihan dukungan yang mengakibatkan adanya rivalitas sesaat tersebut mengikutsertakan pertanyaan berkaitan di antaranya yakni, siapa saja yang aktor/elite yang terlibat di dalam proses perubahan dukungan politik yang dilakukan oleh Soekarwo? Apa yang melatarbelakangi keterlibatan aktor/elite tersebut? Apakah kontestasi Pemilu Gubernur Provinsi Jawa Timur erat kaitannya dengan kontestasi di tingkat nasional? Atau hanya sebatas kepentingan Soekarwo yang mencari saluran baru dalam karier politiknya pasca sepuluh tahun menjadi gubernur? Dengan kata lain, penelitian ini terfokus ingin menjawab faktor penentu yang menjadi landasan peralihan dukungan yang dilakukan Soekarwo dalam Pemilu Gubernur Jawa Timur tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan Teori Kerja Sama Antagonistik (Best, 2010), Teori *Boundary Control, Party-led Transition* (Gibson, 2012), dan Teori Integrasi dan Lingkaran Elite (Higley, 1991) untuk menjawab mengapa elite politik dapat bekerja sama dan menekan konfliknya dalam

konteks persaingan politik. Best (2010) menyatakan bahwa *antagonistic cooperation* menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana elite politik bekerja sama dan membatasi konflik di antara para elite dalam kontestasi kekuasaan. *Pertama*, Best (2010) menilai bahwa elite berusaha menghadirkan kondisi untuk menang secara bersama (*win-win solution*). Bahkan dalam kondisi tertentu, elite membuka ruang interaksi untuk dapat bekerja sama dengan kompetitor, sekalipun kepentingan di antara para elite tidak tercapai sepenuhnya. Best (2010) melihat bahwa tujuan mendasar di antara elite dapat tercapai, kemudian akan ada lagi tujuan lain yang mengakibatkan perubahan imbalan dan rusaknya ikatan yang telah dibentuk. *Kedua*, dalam suatu kontestasi elite dalam membangun hubungan, elite cenderung mengurangi kelompok elite lain yang bersaing, khususnya melalui keterikatan dalam mempertahankan keadaan politik sebagai arena dan aturan main yang aman untuk kontestasi kekuasaan (Bourricaud dalam Best, 2010: 103). Dalam hal ini, elite yang mampu mendapatkan kepentingannya di dalam kontestasi yang terbatas harus memiliki keterikatan dengan jaringan informal lintas partai, bekerja sama dengan kompetitor di partai yang berbeda untuk dapat berjuang bersama. Elite tersebut dilihat sebagai pemimpin yang efektif dan melekat pada aturan-aturan untuk kontestasi dan pembagian kekuasaan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan proposisi *party-led transition* dari Teori Boundary Control yang menilai bahwa terdapat aktor elite partai nasional yang bekerja sama dengan aktor oposisi lokal dan menginvestasikan sumber daya untuk melawan aktor petahana lokal (Gibson, 2012: 32). Terdapat nasionalisasi konflik lokal yang menghasilkan sejumlah aktor yang meningkatkan bentuk koalisi bagi oposisi dan meningkatkan oposisi dapat mengalahkan petahana di tingkat provinsi (Gibson, 2012: 25). Pergulatan kekuasaan yang melibatkan elite nasional dan daerah tersebut berlangsung dalam mekanisme yang berlaku di tingkat lokal yakni pemilihan di daerah. Dalam hal ini, nasionalisasi konflik tersebut dilakukan melalui aktivasi dan mobilisasi kekuatan oposisi lokal yang membawa klaim atas keluhan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Peran aktor nasional ini dilakukan dengan menguatkan kemampuan sumber daya materi aktor lokal sebagai mekanisme utama dalam mengalihkan keseimbangan perebutan kekuasaan di tingkat lokal (Gibson, 2012: 32).

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan teori integrasi dan lingkaran elite (John Higley, 1991) menjelaskan tentang terdapat hubungan saling ketergantungan di antara para elite sehingga terdapat ikatan pertemanan dan hubungan personal yang dibangun. Teori ini memiliki relevansi mengenai cara pandang yang dapat melihat bahwa dalam konteks rivalitas dan kerja sama oleh elite yang bersaing tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain. Ini menyebabkan keputusan elite dalam menjadi rival dan kerja sama bergantung pada lingkaran di sekitar elite dalam memberikan pertimbangan. Menurut Higley (1991), integrasi yang tercapai di antara elite akan mengizinkan adanya akses bagi anggota dalam pembuatan keputusan dan pengembangan persepsi tentang keterikatan di antara elite. Di dalam suatu integrasi elite, terdapat lingkaran elite yang merupakan bagian yang rapat, terbatas, dari kelompok elite yang luas. Elite berusaha mempengaruhi lingkaran-lingkaran ini untuk mencapai integrasi maksimal tanpa melalui desain atau bentuk permanen dari suatu kelompok elite (Higley, 1991: 37).

Di dalam lingkaran elite, akses kepada arena pusat dari pembuatan keputusan tidak terbuka untuk siapa pun, sehingga arena pusat hanya dapat diakses oleh elite tertentu yang memiliki akses pada arena tersebut. Pusat lingkaran elite terhubung dengan berbagai lingkaran puncak dari integrasi elite. Terbentuknya elite tersebut akibat memiliki lingkaran spesifik dan aktif dalam berbagai isu atau beragam pembuatan keputusan sebagai tempat bagi elite di tingkat nasional menggunakannya dan membantu peralihan dan memprioritaskan keputusan serta melanjutkan struktur komunikasi kunci untuk merancang dan mengagregasi pertukaran, kompromi dan pemahaman.

Teori Integrasi dan Lingkaran Elite ini digunakan untuk melihat kelompok-kelompok yang memiliki lingkaran terdalam dalam menghasilkan keputusan melalui kelompok elite. Soekarwo, Khofifah, dan Saifullah merupakan elite Jawa Timur yang masing-masing memiliki lingkaran berbeda. Perbedaan tersebut kemudian menjadi bagian dari adanya kompromi untuk menghasilkan lingkaran yang lebih spesifik dalam membentuk kerja sama untuk memenangkan pemilihan 2018. Teori ini ditujukan untuk melihat faktor dominan dari Soekarwo dalam menentukan dukungan kepada Khofifah sebagai bentuk keterikatan di antara kelompok elite dalam membentuk lingkaran dan integrasi bersama. Selain itu, terdapat perbedaan di antara

lingkaran Khofifah dan Saifullah sekalipun memiliki latar belakang NU yang sama. Oleh karena itu, teori ini ditujukan untuk melihat faktor dominan dari pilihan elite dalam menentukan lingkaran elite dalam usaha memenangkan Pemilu 2018.

Gambar 1. Kerangka alur berpikir

Skema alur berpikir di atas menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yaitu hubungan saling ketergantungan antar elite (Higley:1991) dan peran elite nasional (Gibson:2012). Dalam menjelaskan hubungan saling ketergantungan antar elite terdapat dua faktor, yaitu elite menghadirkan kondisi untuk menang dan elite cenderung mengurangi persaingan antar elite yang berkontestasi (Best:2010). Di mana akhirnya Soekarwo mengalihkan dukungannya kepada Khofifah meskipun selama dua Pemilu sebelumnya saling berhadapan, sehingga terjadi rivalitas semu/kerja sama antagonistik antara Soekarwo dan Khofifah.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang menginterpretasikan data-data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh. Sedangkan Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh data untuk memperdalam wawasan mengenai dinamika perubahan elite di Jawa Timur, khususnya rivalitas dan kerja sama elite.

Menurut Neumann dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan teori dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan di mana data yang diperoleh diliteraturkan, diinventarisasi, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan (Neumann, 2014). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu berupa literatur-literatur yang terkait konflik dan konsensus elite. Literatur ini bisa didapat dari media cetak, media online, jurnal, penelitian-penelitian lainnya, website resmi partai politik, ataupun website organisasi-organisasi nasional. Setelah data tersebut didapat, lalu data tersebut diolah dan dianalisis.

Penelitian ini menggunakan proposisi *party-led transition* dari Teori Boundary Control yang menilai bahwa terdapat aktor elite partai nasional yang bekerja sama dengan aktor oposisi lokal dan menginvestasikan sumber daya untuk melawan aktor petahana lokal (Gibson, 2012: 32).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergulatan kekuasaan yang melibatkan elite nasional dan daerah ini berlangsung dalam mekanisme yang berlaku di tingkat lokal yakni pemilihan di daerah. Peran aktor nasional dilakukan dengan menguatkan kemampuan sumber daya materi aktor lokal sebagai mekanisme utama dalam mengalihkan keseimbangan perebutan kekuasaan di tingkat lokal (Gibson 2012: 32). Menurut penulis terdapat dua pengaruh elite nasional yang menjadi faktor peralihan dukungan Soekarwo terhadap Khofifah Indar Parawansa di Pemilu Jawa Timur 2018, yaitu faktor DPP Partai Demokrat dan faktor adanya *Jokowi Effect*.

Berdasarkan keterangan Soekarwo, bahwa memang benar ia mendukung Khofifah dalam Pemilu Jawa Timur 2018, walaupun ia menambahkan tidak ada perjanjian tertulis terhadap dukungannya tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa sebagai ketua DPD partai Demokrat Jawa Timur, ia mengikuti instruksi dari DPP Partai Demokrat.

Yang mendukung Bu Khofifah adalah Partai Demokrat dan saya menjadi ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, secara struktural mengikuti kebijakan dan instruksi DPP Partai Demokrat. (Wawancara dengan Soekarwo, Petahana dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada 25 Juli 2020)

Selanjutnya, Soekarwo pun menjelaskan terkait peralihan dukungannya tersebut mengapa tidak mendukung wakilnya selama 10 tahun, yaitu Saifullah Yusuf.

Sebelum ada instruksi dari DPP Partai Demokrat kami mendukung Gus Ipul sebagai calon gubernur, dan setelah ada instruksi struktural dari DPP Partai Demokrat kami tidak bisa mendukung Gus Ipul. (Wawancara dengan Soekarwo, Petahana dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada 25 Juli 2020)

Keputusan Soekarwo dalam mendukung Khofifah pada Pemilu Jawa Timur 2018 dibenarkan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Renville Antonio. Ia mengatakan bahwa Soekarwo adalah kader Partai Demokrat sehingga sudah pasti ia mengikuti arahan dari DPP terkait dukungan kepada Khofifah.

Secara kepartaian ya pasti mendukung Khofifah, tapi secara pribadi saya tidak tahu kan Pakde punya pilihan sendiri. Tapi beliau memang betul-betul kader partai yang tulen, jadi ketika partai sudah menetapkan dukungannya kepada Bu Khofifah ya full dia ke partai. Hanya mungkin kemarin waktu itu Pakde masih menjaga, karena Gus Ipul itu hampir 10 tahun bersama dia, tentu dia menjaga perasaan Gus Ipul, oleh karena itu dia tidak langsung turun, beliau menugaskan saya tapi dia all out untuk mengawal rekomendasi partai dalam mengusung Bu Khofifah. (Wawancara dengan Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada 8 Juni 2020 di DPP partai Demokrat)

Mengenai mengapa Soekarwo tidak mendukung Saifullah Yusuf, Renville Antonio lebih menekankan bahwa itu merupakan instruksi partai sebab Soekarwo adalah ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Ia pun mengatakan bahwa sebenarnya Soekarwo mendukung Gus Ipul, bahkan ia telah menawarkan partai Demokrat untuk menjadi pengusungnya. Namun, ada alasan tersendiri dari Saifullah Yusuf sehingga ia tidak menyambutnya dan beralih kepada PDIP.

Kalau memang mau tahu kebenarannya, Gus Ipul sudah mendaftar kepada kami, Partai Demokrat sudah meminta, Pakde (Soekarwo) di hadapan Ketua Umum kami waktu itu Pak SBY sudah meminta untuk Gus Ipul menjadi kader Partai Demokrat. Kan tentu kami ingin kalau mendukung seseorang itu ya harus sebagai kader. Karena kami waktu itu pengusung terbesar, ternyata Gus Ipul tidak bisa. Kemudian ditawarkan lagi wakilnya Gus Ipul salah satu dari kader Partai Demokrat, tapi Gus Ipul tidak berkenan, mintanya dari PDI Perjuangan, ya selesai kalo begitu. Jadi bukannya Pakde (Soekarwo) tidak mendukung Gus Ipul, Pakde (Soekarwo) mendukung dengan membawa Gus Ipul ke Jakarta terus mengawal sendiri Gus Ipul, masih ada fotonya. Gus Ipul kita bawain Demokrat dan Pakde sudah ngomong, tolong Gus ya bantu Demokrat, Gus Ipul masuk Demokrat, enggeh, tapi ketika waktu di Jakarta ternyata beliau berubah, ya sudah kami juga tidak bisa memaksa karena itu pribadinya Gus Ipul. (Wawancara dengan Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada 8 Juni 2020 di DPP Partai Demokrat)

Menurut Renville Antonio, sebenarnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum partai Demokrat sudah setuju untuk mendukung Saifullah Yusuf asalkan ia mendaftarkan diri menjadi kader Demokrat. Namun, keputusan Saifullah Yusuf sendiri yang menolak hal tersebut. Faktor inilah yang menyebabkan Demokrat memperpanjang masa pendaftaran dan memutuskan untuk mendukung Khofifah.

Karena Gus Ipul tidak bisa, sehingga muncul lah calon Bu Khofifah yang kemudian diterima dalam masa perpanjangan pendaftaran. Kan akhirnya kami buka perpanjangan tuh pendaftaran. (Wawancara dengan Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada 8 Juni 2020 di DPP Partai Demokrat)

Renville Antonio pun menambahkan bahwa sekarang pun, Khofifah bukanlah kader Partai Demokrat. Namun, wakilnya Emil Dardak yang menjadi kader partai Demokrat, walaupun bukan sebagai pengurus untuk saat ini dan di proyeksikan akan menjadi pimpinan partai Demokrat Jawa Timur di kemudian hari.

Bagaimana dengan sekarang? Bu Khofifah tidak masuk Demokrat, tapi Mas Emil Demokrat. Setelah menang Pemilihan Gubernur pencoblosan, selang 2 minggu mereka (Emil Dardak) langsung masuk kader partai cuma memang tidak masuk pengurus, karena tidak ada mekanisme masuk pengurus, belum masuk pengurus. Kalau nanti ke depan ada ya tidak tertutup kemungkinan juga dia akan pegang Demokrat juga di Jawa Timur. (Wawancara dengan Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada 8 Juni 2020 di DPP Partai Demokrat)

Sebelumnya, mengenai dukungan Soekarwo kepada Khofifah menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Pasalnya, beredar dua surat dukungan berbeda bertanda tangan dirinya. Surat dukungan pertama diberikan Soekarwo kepada pasangan nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dan surat kedua yang berisi perjanjian antara Soekarwo dengan calon gubernur nomor urut dua Saifullah Yusuf. Pada surat pertama yang dirilis pada 23 Juni 2018 dan ditulis di kertas berkop Partai Demokrat ini berisi empat alasan Soekarwo mendukung Khofifah-Emil, salah satunya karena keduanya memiliki kapabilitas untuk memimpin Jawa Timur. Selain Soekarwo, surat itu juga ditandatangani Sekretaris DPD Demokrat Jawa Timur, Renville Antonio. Surat kedua dibuat pada tahun 2013, Surat itu dibuat pada 2013 saat keduanya akan maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Satu dari lima poin yang menjadi sorotan dalam surat itu adalah Soekarwo jika terpilih sebagai gubernur Jawa Timur harus memberikan peran secara proporsional kepada Gus Ipul sebagai pendampingnya dan mempersiapkannya menjadi gubernur periode selanjutnya. Selain ditandatangani Soekarwo, surat itu juga ditandatangani lima kiai sebagai saksi KH Zainuddin Jazuli, KH Nurul Huda Jazuli, KH Idris Marzuki, KH Anwar Manshur, dan KH Anwar Iskandar di atas materai Rp6.000. (Aminuddin, 2018)

Dilansir dari Detik.com, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Partai Demokrat akan *all out* dalam mendukungnya pada Pemilu 2018. (Budianto, 2018) dalam kesempatan lain, Soekarwo yang merupakan ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyiapkan Agus Harimurti untuk mengampanyekan pasangan Khofifah-Emil di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun terlihat beberapa kali hadir dalam kampanye yang dilakukan oleh Khofifah di Jawa Timur.

Soekarwo pun tidak menampik bahwa kemenangan Khofifah di Jawa Timur berkat dukungan partai Demokrat Jawa Timur di mana ia merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Menurutnya Faktor yang memenangkan Khofifah adalah dukungan seluruh Partai Demokrat Jawa Timur mulai dari DPC, DPD dan DPP. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Renville Antonio, sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang mengatakan bahwa kemenangan Khofifah tidak lepas dari dukungan Soekarwo.

Pasti ada (pengaruh Soekarwo terhadap kemenangan Khofifah). Kalau tidak salah dulu hasil surveinya Poltracking waktu itu juga, faktor incumbent Pakde Karwo itu berapa koma berapa persen gitu. Dan kemudian memang di masyarakat itu yang dilihat representasi Pakde memang waktu itu saya (Renville), dimasukkan ke tim sukses itu supaya masyarakat tahu ada representasi Pakde Karwo. Memang kalo di Jawa Timur itu sebagian besar melihat saya ya Pakde berarti itu.

LITERATUS is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that LITERATUS can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities, Education, Management, History, Economics, Linguistics, Literature, Religion, Politics, Sociology, Anthropology, and others.

(Wawancara dengan Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada 8 Juni 2020 di DPP Partai Demokrat)

Renville Antonio pun menambahkan salah satu bentuk konkret dukungan yang diberikan Soekarwo kepada Khofifah adalah menggerakkan mesin politiknya untuk memenangkan Khofifah. Bahkan, ia memasukkan nama Martono yang dulu sebagai ketua tim suksesnya pada dua Pemilu Jawa Timur untuk menjadi tim penasihat Khofifah-Emil.

Mesin politik beliau kan Demokrat, semuanya bergerak untuk Bu Khofifah. [Berarti yang tahun 2008 mesin politiknya 2013] mesin politik itu kan partai, karena dia ketua partai, bergerak full. Bahkan ketua tim suksesnya beliau, namanya Pak Martono, yang 2 periode Ketua Tim Sukses Pakde Karwo-Gus Ipul 2 kali, itu menjadi penasehat Tim Sukses Bu Khofifah. (Wawancara dengan Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada 8 Juni 2020 di DPP Partai Demokrat)

Hasil dari dukungan Soekarwo dan partai Demokrat kepada Khofifah pun dapat terlihat dari hasil perolehan Khofifah-Emil pada 13 kabupaten/kota di mana kabupaten/kota tersebut selalu dimenangkan oleh Soekarwo karena memang merupakan basis masa Soekarwo.

Jadi ciri Demokrat itu, kami ini setiap pilkada sejak Demokrat berdiri, saya kan waktu itu ikut masuk di awal, Dapilnya Demokrat itu 2: Dapil Mataraman sama Dapil Madura itu dapil kami. Kalau dapil lain kami dapat 1 kursi, maka dapil Mataraman, Pacitan, Magetan, Ngawi dan sekitarnya sama Dapil Madura kami pasti 2. Kalau Dapil lain itu kami dapat 2, Dapil Madura atau Dapil Mataraman pasti dapat 3. Jadi pasti lebih 1 kursi dari Dapil lain” (Wawancara dengan Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada 8 Juni 2020 di DPP Partai Demokrat)

Soekarwo dan DPP Partai Demokrat dapat dianggap sebagai kepingan *puzzle* pelengkap bagi mesin politik Khofifah di Pemilu Jawa Timur 2018. Pada era Orde Baru, otoritas politik dipegang oleh militer yang menopang sentralisme negara. Sampai periode Gubernur Imam Utomo yang berakhir tahun 2008, Jawa Timur selalu dipimpin oleh pejabat berlatar belakang militer. Mereka bekerja dengan menggunakan perangkat birokrasi dan struktur militer. Dalam Pemilihan Gubernur 2008 dan 2013, ada tiga irisan penting, yaitu kelompok nasionalis dengan PDIP sebagai motor politik utama, pengurus Nahdlatul Ulama yang disokong barisan elite pesantren, dan jejaring birokrasi yang mempunyai struktur hierarki yang rapi. Dalam Kedua Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang dimenangkan Soekarwo, ia dapat memainkan peran sebagai otoritas birokrasi sekaligus kader nasionalis dari kelompok alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang erat dengan PDIP. Sementara pada irisan pendukung dari NU dan para kiai, Soekarwo mengandalkan Saifullah Yusuf (Aminudin, 2018)

Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, dua kader NU, Khofifah dan Saifullah, sama-sama tak punya irisan ideologis dengan kelompok nasionalis dan jejaring birokrasi. Di sinilah Soekarwo memainkan peranan penting. Dukungan kelompok nasionalis tidak bisa dikonsolidasikan dengan baik oleh Saifullah, sekalipun ia diusung oleh PDIP dan mendudukkan Puti Guntur sebagai wakilnya. Puti Guntur Soekarno yang dipasang sebagai calon wakil harus bekerja ekstra keras untuk meningkatkan popularitas Hal ini juga dapat dilihat dari hasil riset yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Poltracking yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2018. Tingkat kepopuleran Puti Guntur Soekarno masih di bawah jika dibandingkan dengan calon lainnya.

Pilihan untuk diusung koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, NasDem, dan Hanura setidaknya menguntungkan dari dua hal. Pertama, dukungan SBY dan Soekarwo secara langsung bisa mengamankan dukungan dari irisan kelompok nasionalis di Partai Demokrat sekaligus jejaring birokrasi. Sedangkan Golkar, Hanura, dan NasDem merepresentasikan jalur elite nasional (Aminudin, 2018).

Vol. 3, No. 1,
April 2021,
pp. 10-22

e-ISSN:
2686-5009

**The Pseudo
Rivalry of
Political Elites
in The
Governor
Election East
Java Province
in 2018**

M. A. Pradana

POPULARITAS KANDIDAT

Kedikenalan Pemilih Terhadap Cagub & Cawagub

Gambar 2. Popularitas Kandidat Jelang Pemilu Jawa Timur 2018

Faktor kedua adalah adanya *Jokowi Effect*. Fatikh Fauzal Adhim dalam jurnalnya yang berjudul *Kinerja Muslimat NU Jawa Timur dalam Strategi Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018* mengatakan setidaknya ada tiga hal dalam melihat kemenangan Khofifah. Pertama adalah strategi penguatan *figure* Nadliyin untuk mendapatkan suara NU, kedua adalah strategi penggunaan busana untuk membentuk karakter dan *image*, ketiga adalah strategi dalam menangani *negative campaign*, keempat adalah *Jokowi Effect* (Adhim, 2019: 11).

Menurut Adhim, Khofifah memberikan *image* bahwa “Khofifah orangnya Jokowi”. Hal ini menjadi modal sosial yang cukup kuat karena memiliki kedekatan dengan presiden Joko Widodo. Sejak Pemilihan Presiden 2014, Khofifah merupakan sosok yang aktif dalam mendukung Joko Widodo. Ia bahkan termasuk dalam tim kemenangan Joko Widodo sebagai juru bicara. Kedekatan Khofifah dengan Jokowi terus berlanjut hingga ia dipercaya menjadi menteri sosial dalam Kabinet Indonesia Kerja. Prestasi dan reputasinya yang baik dalam memimpin kementerian juga sering dipuji oleh Presiden Joko Widodo. Khofifah dengan sangat baik mampu memanfaatkan momentum saat dirinya menjabat sebagai menteri sosial. Kedekatan dengan Joko Widodo inilah yang dijadikan Khofifah sebagai modal sosial dalam merebut hati pemilih di Jawa Timur (Adhim, 2019: 11).

Jokowi Effect dalam konteks ini tidak hanya berpengaruh terhadap suara dalam pemilihan umum, namun juga peralihan dukungan Soekarwo kepada Khofifah. Soekarwo yang selama ini merupakan pemimpin daerah berharap dapat naik tingkat menjadi elite nasional. Soekarwo berharap, dengan diberikan dukungan kepada Khofifah, Ia dapat masuk ke dalam lingkaran Joko Widodo, mengingat Joko Widodo akan mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Presiden 2019. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Soekarwo menjadi Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) setelah Joko Widodo menang dalam Pemilihan Presiden 2019.

Faktor penguat lainnya adalah keterlibatan DPP Partai Golkar dalam mengamankan jaringan yang telah dibangun dan dirawat Khofifah selama menjabat sebagai Menteri Sosial. Selama tiga tahun terakhir, Khofifah sebagai Menteri Sosial rajin merawat basis warga kelas bawah melalui pemberian bantuan uang tunai dan program penunjang pengentasan kemiskinan yang dikoordinasi Kemensos. Idrus Marham, pengganti Khofifah sebagai Menteri Sosial, diambil dari Golkar yang bisa dianggap bagian dari pengamanan jejaring yang sudah dibangun Khofifah di Jawa Timur.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa terdapat hubungan saling ketergantungan antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo. Khofifah membutuhkan dukungan dari Soekarwo agar dapat menang di daerah-daerah basis massa Soekarwo dan Soekarwo butuh dukungan Khofifah untuk dapat menjadi elite nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh John Higley (1991) yang menjelaskan tentang adanya hubungan saling ketergantungan di antara para elite sehingga terdapat ikatan pertemanan dan hubungan personal yang dibangun. Teori ini memiliki relevansi mengenai cara pandang yang dapat melihat bahwa dalam konteks rivalitas dan kerja sama oleh elite yang bersaing tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain. Bahkan dalam kondisi tertentu, elite membuka ruang interaksi untuk dapat bekerja sama dengan kompetitornya, sekalipun kepentingan di antara para elite tidak tercapai sepenuhnya.

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan model elite antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo. Khofifah merupakan elite nasional, di mana karier politiknya terbangun di Jakarta, bukan Jawa Timur. Sejak Orde Baru, tepatnya 1992, karier politik Khofifah dapat dikatakan cukup gemilang. Ia pernah menjadi ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1992 hingga 1997. Pada periode itu, ia juga menjabat sebagai pimpinan Komisi VIII DPR RI tahun 1995–1997 dan anggota Komisi II DPR RI 1997–1998. Setelah itu, pada 1999 ia juga pernah menjadi wakil ketua DPR RI dan sekretaris fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di tahun yang sama, di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ia dipercaya untuk menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Karier politik Khofifah terus berlanjut pasca pemerintahan Gus Dur. Pada 2004–2006, ia menjadi Ketua Komisi VII DPR RI dan Ketua Fraksi PKB. Pada 2014, ia dipercaya menjadi menteri sosial oleh Presiden Joko Widodo hingga 2018.

Hal ini berbeda dengan Soekarwo, yang merupakan elite lokal. Pada 1983–1994, Soekarwo merupakan kepala cabang Dinas Pendapatan Surabaya Selatan. Pada 1994, Soekarwo naik pangkat menjadi Kepala Subdinas Perbankan pada Dinas Pendapatan Surabaya. Hanya butuh tiga tahun, ia berhasil menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kariernya di birokrasi terus meningkat hingga pada 2003 ia menjadi Sekretaris Daerah Jawa Timur hingga 2008. Selain itu, pada 2005 hingga 2009 ia juga mengemban jabatan sebagai Komisaris Utama Bak Jawa Timur. Pada tahun 2009, ia maju dalam Pemilukada Jawa Timur dan terpilih. Ia pun melanjutkan kepemimpinannya menjadi dua periode. Selain itu, di partai politik pun ia dianggap sebagai tokoh daerah. Sejak 2010 hingga 2019, ia menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Berdasarkan karier politik Soekarwo yang merupakan elite daerah serta Khofifah Indar Parawansa yang merupakan elite nasional, maka Soekarwo perlu menimbang siapa di antara Khofifah dan Saifullah Yusuf yang dapat memberi keuntungan strategis. Menurut penulis, salah satu pertimbangan Soekarwo dalam mendukung Khofifah adalah karena harapan Soekarwo untuk menjadi elite nasional, dan hasil ini tercapai dengan diangkatnya ia sebagai Watimpres (Wakil Pertimbangan Presiden) Joko Widodo pada periode 2019–2024. Soekarwo merasa yakin bahwa Joko Widodo yang saat itu baru satu periode akan maju dan terpilih kembali di periode kedua. Serta kedekatan Khofifah dengan Presiden Joko Widodo dapat mengantarkannya menjadi elite nasional. Walaupun pada Pemilu Presiden tahun 2019 Partai Demokrat tidaklah mendukung Joko Widodo, namun ia tetap mendapatkan posisi Watimpres. Dari sini penulis berpendapat bahwa ada pengaruh dukungannya terhadap Khofifah dengan terpilihnya Ia menjadi watimpres.

Guna memuluskan jalannya menjadi elite nasional, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Soekarwo adalah memenangkan Khofifah di Pemilukada Jawa Timur. Dengan bantuan Soekarwo, Khofifah berhasil memenangkan 13 wilayah yang sebelumnya tidak pernah ia menangkan di dua Pemilukada Jawa Timur sebelumnya. yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Sampang.

Selain itu, sebagai gubernur yang sudah menjabat selama dua periode, tentunya Soekarwo menginginkan calon yang didukungnya menang agar kebijakan-kebijakan serta apa yang telah ia lakukan selama 10 tahun tetap dapat diteruskan. Menurut Soekarwo, sampai saat ini Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur yang ia dukung dan menggantikannya masih melanjutkan apa yang telah ia lakukan. Walaupun, dengan adanya wabah Covid-19 membuat Gubernur Khofifah lebih fokus pada penanganan.

Kepemimpinan Bu Gubernur setelah 12 Februari 2019 / setelah pelantikan gubernur, sebagian besar masih melakukan anggaran murni 2019 yang di tetapkan Gubernur Soekarwo dan DPRD 2018. Kepemimpinan Bu Gubernur di tahun 2020 fokus terhadap penanganan dan penanggulangan Covid-19. (Wawancara dengan Soekarwo, Petahana dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur pada 25 Juli 2020)

Setelah berhasil memenangkan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur, maka tahap selanjutnya adalah memenangkan Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019, walaupun partainya tidak mendukung Joko Widodo. Peran Soekarwo dalam memenangkan Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 dapat terlihat dari dua wilayah yang merupakan basis masa Soekarwo berhasil berubah menjadi wilayah kemenangan Joko Widodo, yaitu Bangkalan dan Magetan. Perlu dicatat bahwa Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014 kalah telak di Bangkalan dan hanya meraih 19% atau 149.258 suara. Pada pemilihan 2019, suara Joko Widodo naik secara signifikan menjadi 58% atau 435.872 suara.

Dari penjelasan ini penulis melihat bahwa ketergantungan antara Soekarwo dan Khofifah bukanlah ketergantungan yang bersifat terpaksa, melainkan hubungan saling menguntungkan satu dengan lainnya atau simbiosis mutualisme. Jika salah satu aktor merasa bahwa dengan bekerja sama justru dapat menghasilkan keuntungan bersama, maka rivalitas dapat berubah menjadi kerja sama. Artinya, dalam konteks politik tidak ada lawan ataupun kawan yang abadi, yang hanya adalah perhitungan untung dan rugi.

PENUTUP

Dari penelitian ini, penulis dapat melihat dua kesimpulan utama yaitu terdapat peran elite nasional dalam peralihan dukungan Soekarwo kepada Khofifah Indar Parawansa dan adanya hubungan saling ketergantungan antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo. Dalam pengaruh elite pusat, terdapat dua faktor utama dan satu faktor pendukung. Dua faktor utama adalah DPP Partai Demokrat dan adanya *Jokowi Effect*, sedangkan faktor pendukung adalah keterlibatan DPP Partai Golkar dalam mengamankan jaringan Khofifah Indar Parawansa.

DPP Partai Demokrat menjadi faktor utama mengapa Soekarwo mendukung Khofifah di Pemilukada Jawa Timur 2018. Sebab, Soekarwo merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan mekanisme penentuan rekomendasi dukungan Pemilukada dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat. Pada mulanya, Partai Demokrat berdasarkan rekomendasi dari Soekarwo sepakat untuk mendukung Saifullah Yusuf. Namun, Saifullah Yusuf justru berbalik arah dan lebih memilih PDIP. Oleh karena itu, DPP Partai Demokrat mengalihkan dukungan kepada Khofifah. Soekarwo yang merupakan kader partai harus mengikuti instruksi pimpinan pusat partainya. Alhasil, ia pun memilih untuk mendukung Khofifah Indar Parawansa di Pemilukada Jawa Timur 2018.

Jokowi Effect juga mempengaruhi alasan Soekarwo mendukung Khofifah di Pemilukada Jawa Timur 2018. Soekarwo yang selama ini merupakan pemimpin daerah berharap dapat naik tingkat menjadi elite nasional. Soekarwo berharap, dengan diberikan dukungan kepada Khofifah, ia dapat masuk ke dalam lingkaran Joko Widodo, mengingat Joko Widodo akan mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Khofifah memberikan *image* bahwa “Khofifah orangnya Jokowi”. Hal ini menjadi modal sosial yang cukup kuat karena memiliki kedekatan dengan presiden Joko Widodo. Alhasil, pasca-Pemilihan Presiden 2019, Soekarwo mendapatkan posisi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), walaupun Demokrat tidak mendukung Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.

Faktor pendukung elite nasional lainnya adalah keterlibatan Partai Golkar. Selama tiga tahun terakhir, Khofifah sebagai menteri sosial rajin merawat basis warga kelas bawah melalui pemberian bantuan uang tunai dan program penunjang pengentasan kemiskinan yang dikoordinasi Kemensos. Idrus Marham, pengganti Khofifah sebagai menteri sosial, diambil dari Golkar yang bisa dianggap bagian dari pengamanan jejaring yang sudah dibangun Khofifah di Jawa Timur.

Kesimpulan kedua adalah adanya hubungan saling ketergantungan antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo. Berdasarkan karier politik Soekarwo yang merupakan elite daerah serta Khofifah Indar Parawansa yang merupakan elite nasional, maka Soekarwo perlu menimbang siapa di antara Khofifah dan Saifullah Yusuf yang dapat memberi keuntungan strategis. Menurut

LITERATUS is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that LITERATUS can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities, Education, Management, History, Economics, Linguistics, Literature, Religion, Politics, Sociology, Anthropology, and others.

penulis, salah satu pertimbangan Soekarwo dalam mendukung Khofifah adalah karena harapan Soekarwo untuk menjadi elite nasional, dan hasil ini tercapai dengan diangkatnya ia sebagai Watimpres (Wakil Pertimbangan Presiden) Joko Widodo pada periode 2019–2024. Soekarwo merasa yakin bahwa Joko Widodo yang saat itu baru satu periode akan maju dan terpilih kembali di periode kedua. Serta kedekatan Khofifah dengan presiden Joko Widodo dapat mengantarkannya menjadi elite nasional. Walaupun pada Pemilu Presiden 2019 Partai Demokrat tidaklah mendukung Joko Widodo, namun ia tetap mendapatkan posisi Watimpres. Dari sini penulis berpendapat bahwa ada pengaruh dukungannya terhadap Khofifah dengan terpilihnya ia menjadi Watimpres.

Guna memuluskan jalannya menjadi elite nasional, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Soekarwo adalah memenangkan Khofifah di Pemilukada Jawa Timur. Dengan bantuan Soekarwo, Khofifah berhasil memenangkan 13 wilayah yang tidak pernah ia menangkan di dua Pemilukada Jawa Timur sebelumnya.

Setelah berhasil memenangkan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur, maka tahap selanjutnya adalah memenangkan Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019, walaupun Demokrat tidak mendukung Joko Widodo. Peran Soekarwo dalam memenangkan Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 dapat terlihat dari dua wilayah yang merupakan basis masa Soekarwo berhasil berubah menjadi wilayah kemenangan Joko Widodo, yaitu Bangkalan dan Magetan. Perlu dicatat bahwa Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014 kalah telak di Bangkalan dan hanya meraih 19% atau 149.258 suara. Pada pemilihan 2019, suara Joko Widodo naik secara signifikan menjadi 58% atau 435.872 suara.

Dari penjelasan ini penulis melihat bahwa ketergantungan antara Soekarwo dan Khofifah bukanlah ketergantungan yang bersifat terpaksa, melainkan hubungan saling menguntungkan satu dengan lainnya atau simbiosis mutualisme. Jika salah satu aktor merasa bahwa dengan bekerja sama justru dapat menghasilkan keuntungan bersama, maka rivalitas dapat berubah menjadi kerja sama. Artinya, dalam konteks politik tidak ada lawan ataupun kawan yang abadi, yang hanya adalah perhitungan untung dan rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, F. F. (2019). *Kinerja Muslimat NU Jawa Timur dalam Strategi Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018*. Dalam Jurnal Universitas Airlangga.
- Aminuddin, M. F. (2019). *Khofifah dan Kepentingan Elite Nasional Pasca-Pilgub Jatim 2018*. <https://tirto.id/khofifah-dan-kepentingan-elite-nasional-pasca-pilgub-jatim-2018-cPiF>
- Ardlyanto, A. (2018). *Masa tenang beredar surat perjanjian Pakde Karwo, Gus Ipul dan kiai-kiai sepuh*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/masa-tenang-beredar-surat-perjanjian-pakde-karwo-gus-ipul-dan-kiai-kiai-sepuh.html>
- Aspinal, E. & Mietzner, M. (2019). *Indonesia's Democratic Paradox*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Baylis, T. A. (2012). Elite Consensus and Political Polarization: Cases from Central Europe. *Historical Social Research*, 90-106.
- Best, H. (2010). Democratic Elitism, Comparative Perspectives. In J. H. Heinrich Best, *Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives*. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Budianto, E. E. (2018). *Pilgub Jatim 2018: Turun Gunung di Kampanye Khofifah-Emil, SBY Dorong Warga Dukung No 1*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3947598/turun-gunung-di-kampanye-khofifah-emil-sby-dorong-warga-dukung-no-1>
- Emmerson, D. K. (1999). *Indonesia Beyond Soeharto*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Feith, H. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing
- Gibson, L. E. (2012). *Boundary Control: Subnational Authoritarianism in federal Democracies*. New York: Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R. (2003). Reorganizing political power in Indonesia: A reconsideration of so-called democratic transitions. *The Pacific Review*

LITERATUS is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that LITERATUS can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities,
Education,
Management,
History,
Economics,
Linguistics,
Literature,
Religion,
Politics,
Sociology,
Anthropology,
and others.

- Higley, J. & Burton, M. (2006). *Elite Foundations of Liberal Democracy (Elite Transformations)*. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
- Moore, G. (1979). The Structure of National Elite Network. *America Sociological Review*
- Neumann, W. L. (2014). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Ridhoi, M. A. (2018). *Cerita di Balik Surat Dukungan Soekarwo untuk Gus Ipul dan Khofifah*. <https://tirto.id/cerita-di-balik-surat-dukungan-soekarwo-untuk-gus-ipul-dan-khofifah-cMYa>
- Sunariyah. (2017). *Saifullah Yusuf, Orang Dekat Gus Dur yang Jadi Cagub Pilihan PDIP*. <https://www.liputan6.com/news/read/3128901/saifullah-yusuf-orang-dekat-gus-dur-yang-jadi-cagub-pilihan-pdip>
- Tomsa, D. (2018). Rezim Resilience and Presidential Politics in Indonesia. *Contemporary Politics Vol 24*
- Yulika, N. C. (2018). *Azwar Anas Mundur Pilkada Jatim Karena Foto Paha Mulus?* <https://www.liputan6.com/news/read/3217332/azwar-anasmundur-pilkada-jatim-karena-foto-paha-mulus>